

TEOLOGI KERUKUNAN DALAM KONTEKS PLURALITAS AGAMA

M. Kursani Ahmad

Dosen Jurusan Aqidah-Filsafat Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari
Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin Telp. (0511) 3266593

Diterima 7 September 2009/Disetujui 15 Desember 2009

Abstract

The plurality of religion is undeniable and it should be theologically understood as civilized relations among different religions and beliefs. Theological dialogue is needed to establish mutual understanding and peaceful relations among religions. This theology is called 'theology of harmony' in which one can put his/her faith in the same line with faith of other people.

Kata kunci: *Pluralitas agama, dialog teologis, teologi kerukunan.*

Pendahuluan

Tantangan teologis paling besar yang kita hadapi dalam kehidupan beragama dewasa ini, adalah bagaimana seseorang yang beragama bisa menempatkan dirinya di tengah kehidupan agama-agama lain, atau dengan istilah lain bagaimana cara berteologi dalam konteks pluralitas agama.

Pada tingkat teologis yang merupakan dasar dari agama, muncul kebingungan-kebingungan, khususnya menyangkut bagaimana kita harus mendefinisikan diri kita di tengah agama-agama lain yang juga eksis dan punya keabsahan. Dalam soal teologi misalnya, adanya suatu kondisi standar ganda (*double standards*)¹ yang menimbulkan ke-

¹Istilah standar ganda (*double standards*) dikemukakan oleh Hugh Goddar, seorang Kristiani, pengajar teologi Islam di Nottingham University, Inggris, menulis sebuah buku yang cukup menentang yang berjudul: *Christians and Muslims: From Double Standards to Mutual Understanding* (1995). Dalam bukunya ia menyimpulkan bahwa, orang Islam ataupun Kristiani selalu menerapkan standar-standar yang berbeda untuk dirinya, yang biasanya standar yang bersifat ideal, sedangkan penilaian terhadap agama lain, memakai standar lain, yang bersifat realitis dan historis. Hal ini membuat hubungan kedua agama tersebut berkembang

bingungan, bahwa agama kita adalah agama yang paling sejati berasal dari Tuhan, sedangkan agama lain adalah hanya konstruksi manusia, atau mungkin juga berasal dari Tuhan, tetapi telah dirusak oleh konstruksi manusia. Dengan standar ganda inilah biasanya dipakai untuk menghakimi agama lain dalam derajat keabsahan teologis di bawah agama kita sendiri, kita menyaksikan bermunculannya perang klaim-klaim kebenaran dan janji penyelamatan, yang kadang-kadang berlebih-lebihan dari satu agama atas agama lain, dengan cara yang canggih telah memainkan peranan dalam permainan bahwa “agamakulah yang paling sempurna di muka bumi ini”, sehingga fenomena yang terjadi adalah, satu agama menjadi ancaman bagi agama lain. Melalui standar ganda inilah, muncul prasangka-prasangka sosiologis dan teologis, yang selanjutnya memperkeruh suasana hubungan antar umat beragama.

Agama pada hakikatnya merupakan dasar untuk mewujudkan kehidupan manusia yang aman, damai, sejahtera dan harmonis. Sebaliknya apabila agama dijadikan sebagai alat *legitimasi* (pembenaran) satu fenomena sosial-budaya, maka agama bisa dijadikan sebagai faktor disintegrasi yang berakibat terjadinya pertentangan-pertentangan yang membawa perpecahan, kekerasan, *anarkis* (tindakan sewenang-wenang) bahkan *vandalisme* (pengrusakan), permusuhan dan penderitaan dalam kehidupan manusia. Sungguh ironis dan memprihatinkan serta sulit dipercaya bahwa agama-agama yang mengajarkan kebaikan, belas kasih dan cinta kasih, turut memberikan andil dalam menebarkan keberingasan dengan motivasi duniawi, politik dan sebagainya.

Kenyataan selama ini, sejarah interaksi antar umat beragama lebih banyak diwarnai oleh kecurigaan dan permusuhan bahkan teror, lebih ironis lagi agama dijadikan unsur utama sebagai mesin penghancur manusia. Suatu kenyataan yang sangat bertentangan dengan ajaran semua agama di atas permukaan bumi ini. Timbul pertanyaan, apakah agama berperan sebagai sumber *problem* (masalah, persoalan) atau sebagai sumber *solusi* (penyelesaian masalah).

menjadi kesalahpahaman, bahkan menimbulkan suasana saling menjadi ancaman di antara keduanya. Lihat Budhy Munawar-Rahman, *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. vi.

Untuk itu banyak tawaran yang diberikan, baik secara teoritis maupun praktis yang dirintis oleh orang-orang yang peduli terhadap kerukunan antar umat beragama dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa demi tercapainya tatanan dunia baru yang penuh kedamaian dan kesejahteraan bersama. Diantaranya, upaya yang ditempuh umat beragama saat ini ialah meninggalkan era monolog untuk beranjak kepada era dialog antar umat beragama, demi terciptanya teologi kerukunan hidup beragama.

Sehubungan dengan itu, dalam tulisan ini penulis berusaha mengetengahkan sebuah deskripsi tentang teologi kerukunan dalam Piagam Madinah dan teologi kerukunan di Indonesia. Serta bagaimana menciptakan teologi kerukunan melalui dialog teologis.

Teologi Kerukunan Dalam Piagam Madinah

Kaum muslimin mengimplementasikan teologi kerukunan ini, dimulai oleh Nabi Muhammad ketika beliau hijrah ke Madinah pada tanggal 2 Rabi'ul Awal tahun ke 13 kenabian atau 14 September 622 M.² Pembentukan Negara-kota Madinah merupakan momen historis dalam rangka *implementasi* (pelaksanaan, penerapan) kerangka teologi, doktrin, dan gagasan kerukunan keagamaan Islam terhadap para penganut agama lain, dalam konteks ini, khususnya agama Yahudi dan Nasrani.

Momen historis itulah yang dikenal dengan penetapan Piagam Madinah (*dustûr al-madînah*) atau sering juga disebut Konstitusi Madinah oleh nabi Muhammad saw.³ Dalam piagam ini, secara tegas

²Awal Muharram dipandang sebagai permulaan tahun baru Hijriyah, sebagai pengagungan kaum muslimin terhadap peristiwa hijrah, terlihat pada pengadopsiannya sebagai permulaan kalender Islam yang dilembagakan 17 tahun kemudian oleh Khalifah Umar bin Khattab. Perhitungannya didasarkan atas peredaran bulan Qamariah. Permulaan hijriyah Nabi Muhammad saw. sendiri sesungguhnya jatuh pada tanggal 2 Rabiul awal tahun ke-13 kenabian atau 14 September 622 M., bukan pada awal Muharram yang ketika itu jatuh pada tanggal 15 Juli 622 M. Antara permulaan hijrah Nabi saw. dan permulaan kalender Islam sesungguhnya terdapat jarak sekitar 62 atau 64 hari, dan di antara keduanya terdapat bulan Safar. Lihat Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, vol. 3, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 111.

³Piagam Madinah telah dituturkan secara lengkap oleh Ibn Hisyam, dan kutipannya dapat dilihat; Hilmi 'Ali Sya'ban, *Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Sallab*, Terj. Tholhatul Choir Wafa, *Nabi Muhammad*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), h. 204-211.

dinyatakan hak-hak penganut agama Yahudi untuk hidup berdampingan secara damai dengan kaum muslimin. Kaum Yahudi menerima piagam Madinah ini secara sukarela, kaum Yahudi terangkat dari sekedar klan kesukuan menjadi warga Negara yang sah. Status kaum Yahudi tersebut tidak pernah dihilangkan dan tidak bisa dilenyapkan. Hal ini telah dicontohkan serta dipraktekkan oleh Rasulullah sendiri sesuai dengan ajaran al-Qur'an mengenai kedudukan khusus mereka sebagai *ahl al-kitab*.⁴

Melalui Piagam Madinah inilah Rasulullah saw. menjadikan pluralisme sebagai paradigma kebijakan publik, yang telah dicatat oleh tinta sejarah, bahwa orang-orang non-Muslim yang berada di Madinah bersama-sama Nabi Muhammad saw. dianggap sebagai umat yang satu. Tidak boleh ada diskriminasi di antara mereka. Siapapun yang berada di Madinah bersama rombongan Nabi harus dilindungi, terutama Yahudi Yatsrib dan tidak ada diantara mereka yang terluka.⁵

Dengan demikian piagam Madinah ini merupakan undang-undang yang paling awal dalam Islam dan piagam ini sesungguhnya adalah kemajuan luar biasa sepanjang sejarah Islam, bahkan sepanjang peradaban manusia di dunia. Sebab, dalam piagam ini, sesungguhnya Nabi Muhammad saw. mencanangkan sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam Islam, dan berhasil mengusung semacam hubungan yang amat maju antar umat Islam dengan orang Arab, umat Yahudi, umat Nasrani dan penganut agama lainnya.

Disinilah tampak Islam mengajarkan tentang sikap toleran terhadap pemeluk agama lain, memberikan kebebasan dalam melaksanakan peribadatan, mencari kehidupan dan menjaga kehormatan Madinah al-Munawarrah, dan berusaha agar tidak ada tindakan kriminal sekecil apapun terjadi. Nabi Muhammad saw. yang pertama kali mengusung gagasan besar yang sangat brilian yang belum pernah dibawa oleh nabi sebelumnya.⁶ Alquran dalam hal ini sangat membantu

⁴Elza Peldi Taher (editor), *Merayakan Kebebasan Beragama Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*, dalam tulisan, Azyumardi Azra, "Toleransi Agama dalam Masyarakat Majemuk: Perspektif Muslim Indonesia", (Jakarta: ICRP, 2009), h. 19.

⁵Zuhairi Misrawi, *al-Qur'an Kitab Toleransi Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*, (Jakarta: Fitrah, 2007), h. 17.

⁶Sya'ban, *Muhammad Shallallahu 'alaih wa Sallab....*, h. 211-212.

kepemimpinan Rasulullah saw. untuk membangun sebuah masyarakat baru yang menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, kedamaian dan keragaman, terutama pada periode Madinah, yang berhasil melahirkan sebuah Piagam Madinah yang dikenal sebagai konstitusi yang amat modern pada zamannya. Bahkan, Piagam Madinah merupakan salah satu model pembangunan masyarakat Islam yang mempunyai latar belakang kemajemukan.⁷

Walaupun dalam perjalannya, orang-orang Yahudi kemudian mengkhianati apa yang disepakati dalam piagam Madinah tersebut, kaum muslimin tetap mengakuinya karena kepatuhan kepada contoh yang diberikan Rasulullah sebagai kepala Negara Madinah.⁸

Teologi Kerukunan di Indonesia

1. Masa Penjajahan

Penyebaran Islam di Indonesia pada umumnya berlangsung melalui proses yang sering disebut sebagai *penetration pacifique* (penyebaran secara damai), di mana Islam pertama kali melalui introduksi oleh para guru sufi pengembara yang datang dari Timur Tengah sejak abad ke 8 dan ke 9 Masehi. Konversi massal selanjutnya terjadi berkat usaha para guru sufi yang mengembara dari satu tempat ketempat lain. Proses semacam ini, pada gilirannya memberikan warna yang cukup khas bagi Islam di Indonesia, yakni Islam yang akomodatif dan inklusif, kalau tidak bisa dikatakan cenderung sinkretik dengan sistem kepercayaan lokal.⁹

Jadi keberhasilan para guru sufi dalam penyebaran Islam di Indonesia, terutama ditentukan oleh pergaulan dengan kelompok-kelompok masyarakat dari rakyat kecil dan keteladanan yang melambangkan puncak kesalehan dan ketakwaan dengan memberikan pelayanan-pelayanan sosial, sumbangan, dan bantuan dalam rangka kebersamaan dan rasa persaudaraan murni. Dengan keteladanan ini penduduk menjadi bersimpati dan memeluk Islam dan kemudian tersebarlah Islam di seluruh penjuru Indonesia.

⁷Misrawi, *al-Qur'an Kitab Toleransi....*, h. 32.

⁸Taher (editor), *Merayakan Kebebasan Beragama....*, h. 19.

⁹Taher (editor), *Merayakan Kebebasan Beragama....*, h. 22.

Menurut Abbas Mahmud al-Aqqad dalam karyanya, *Al-Islâm fi al-Qarn al-Tsyryn: Hâdhirihî wa Mustaqbalihî*, yang dikutip oleh Alwi Shihab, mengatakan bahwa: “Barangkali kepulauan Indonesia ini merupakan tempat paling layak untuk membuktikan kenyataan bahwa Islam diterima dan berkembang di tengah-tengah penduduk yang menganut agama lain. Di setiap penjuru negeri terdapat bukti nyata betapa keteladanan yang baik berperan dalam penyebaran Islam tanpa menggunakan kekerasan”.¹⁰

Dengan demikian semakin jelaslah bahwa, melalui ajaran tasawuf adalah faktor terpenting bagi tersebarnya Islam di Indonesia secara luas tanpa menggunakan kekerasan. Hal ini telah disepakati oleh kalangan sejarawan, peneliti, orientalis dan para cendekiawan Indonesia. Betapapun begitu menurut Alwi Shihab, beberapa pandangan berkaitan dengan pernyataan ini perlu didiskusikan lebih lanjut, dikritisi dan dijernihkan sehingga kita sampai pada suatu pandangan yang valid.¹¹

Pada tahun 1596 Belanda tiba di Indonesia.¹² Kedatangan Belanda yang diikuti oleh para misionaris Kristen, maka terjadilah perbenturan kaum muslimim dengan kolonial Belanda dalam batas-batas tertentu dengan meningkatnya eksklusivisme Islam, bahkan mendorong terjadinya konsolidasi dan intensifikasi identitas Islam. Hal ini telah diungkapkan oleh Steenbrink (1995) dalam bukunya, *Kawan dalam Pertikaian: Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596-1942)*, diterbitkan Mizan Bandung dari judul asli, *Dutch Colonialism and Islam: Contact and Conflicts 1596-1950* (1993), yang dikutip oleh Azyumardi Azra, menyebutkan bahwa konflik, mispersepsi, bias dan sebagainya yang berkembang di kalangan pengusaha kolonialis Belanda dan misionaris Kristen terhadap Islam. Semua ini, bisa

¹⁰Alwi Shihab, *Antara Tasawuf Sunni dan Tasawuf Falsafi Akar Tasawuf di Indonesi*, (Depok: Pustaka IIMaN, 2009), h. 22.

¹¹Shihab, *Antara Tasawuf Sunni*...., h. 22.

¹²Belanda tiba di Indonesia untuk mencari rempah-rempah, kemudian Belanda mendirikan persatuan (*Verenigde*) antara perseroan-perseroan (*compagnie*) yang berdagang di Indonesia (*Oost-Indische*), sehingga persatuan tersebut bernama: “*Verenigde Oost Indische Compagnie*” disebut VOC. Mula-mula datang di Indonesia bangsa Portugis (1512), disusul Belanda (1596) dan kemudian Inggris (1811). Tercatat tiga setengah abad lamanya Belanda menjajah Indonesia, yang berakhir pada tanggal 8 Maret 1942. Pada tahun 1942 Jepang datang Belanda pergi. Lihat Kabul Budiyo, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 13.

diduga, tidak kondusif bagi penciptaan kehidupan keagamaan yang rukun, harmonis, saling respek, dan penuh toleransi.¹³

Dengan dukungan pemerintah kolonial Belanda terhadap misi Kristen ini, maka semakin menimbulkan pandangan yang negatif di kalangan Muslimin Indonesia, yang beranggapan bahwa Kristen adalah agama para penjajah. Diperparah lagi ketika diketahui bahwa bantuan pemerintah kolonial Belanda terhadap gereja dan lembaga-lembaga Kristen lainnya sangat jauh lebih besar daripada yang diberikan kepada kaum muslim Indonesia. Hal ini tentunya memunculkan reaksi di kalangan kaum muslimin. Kalangan ulama tradisional memutuskan untuk tidak menjalin hubungan yang dekat dengan pemerintah kolonial Belanda dan hanya memusatkan perhatian pada kegiatan dakwah Islam melalui pesantren-pesantren. Sebaliknya, kalangan reformis seperti Ahmad Dachlan pendiri Muhammadiyah, mencoba untuk mengadopsi lembaga-lembaga sosial seperti rumah sakit dan panti serta sistem sekolah yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda, yang bertujuan untuk mencari tahu bagaimana cara mengelola lembaga-lembaga sosial tersebut. Dengan sikap ini Muhammadiyah menerima subsidi dari pemerintah kolonial Belanda, meskipun jumlahnya tetap lebih kecil dibandingkan dengan lembaga-lembaga Kristen. Pada akhirnya sepeninggal Ahmad Dachlan, hubungan pimpinan Muhammadiyah dengan tokoh-tokoh Kristen memburuk, salah satu sebab adalah karena konflik soal bantuan pemerintah kolonial Belanda yang dianggap mengancam Kristen.¹⁴

Ketika Kolonial Belanda harus minggir akibat datangnya pasukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942, dan selama masa pendudukan Jepang yang hanya 42 bulan (Maret 1942-Agustus 1945) dilakukan perombakan besar-besaran terhadap sistem yang ditinggalkan kolonial Belanda. Di antaranya kebijakan pemerintah kolonial Jepang yang sangat mendukung perkembangan Islam sambil memberikan prestise sosial dan politis kepada para pemimpin Islam di Indonesia. Di sini jelas pemerintah

¹³Taher (editor), *Merayakan Kebebasan Beragama...*, h. 22.

¹⁴Mujiburrahman, *Mengindonesiakan Islam: Representasi dan Ideologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 268-269.

kolonial Jepang menggunakan politik *divide et impera* terhadap kelompok-kelompok elite pribumi secara lebih agresif dari kolonial Belanda, dengan memanfaatkan persaingan antara ketiga kelompok elite pribumi tersebut, yakni kelompok Priyayi, Islam, dan Nasionalis. Kebijakan Jepang terhadap Islam ini, karena Jepang tertarik kepada orientasi Islam yang anti Barat, di samping upaya untuk mendapatkan dukungan baik dari kalangan rakyat maupun dari para pimpinannya, baik dari lingkungan kota dan dari pedesaan.¹⁵

Pemerintah kolonial Jepang mencoba mendekati pemimpin-pemimpin Muslim santri, baik melalui pendirian organisasi seperti Masyumi, atau melalui latihan-latihan militer. Dengan alasan inilah, sebagian dari tokoh-tokoh nasionalis Muslim juga mau bekerjasama dengan Jepang. Selain itu, di masa kolonial Jepang ini, banyak di antara misionaris Kristen yang dibunuh atau ditangkap, dan hubungan gereja-gereja lokal dengan Eropa sempat terputus. Peristiwa ini tentunya begitu berat dirasakan oleh orang-orang Kristen, tetapi pada saat yang sama memunculkan kemandirian gereja dan semangat nasionalisme di kalangan Kristen sendiri.¹⁶

Dengan demikian, jelaslah bahwa terjadinya konflik-konflik antar pemeluk agama waktu itu lebih disebabkan oleh kebijakan para penguasa daripada oleh perbedaan pendapat di kalangan rakyat sendiri. Bagi rakyat kebanyakan, bisa dikatakan bahwa sebenarnya masalah konflik antaragama yang murni itu hampir tak ada. Dengan kata lain, konflik antaragama yang ada adalah bagian dari dinamika politik, yakni dinamika perebutan kekuasaan dan pengaruh demi kepentingan elite penguasa.¹⁷

2. *Pasca Kemerdekaan*

Puncak dari pengembangan teologi kerukunan Islam di Indonesia, adalah penerimaan Pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi nasional

¹⁵Taher (editor), *Merayakan Kebebasan Beragama....*, dalam tulisan Baskara T. Wardaya, "Beriman di Negeri Plural", h. 547-548.

¹⁶Mujiburrahman, *Mengindonesiakan Islam....*, h. 270.

¹⁷Taher (editor), *Merayakan Kebebasan Beragama....*, h. 550.

pada tanggal 18 Agustus 1945. Berawal ketika Panitia Sembilan yang berhasil merancang pembukaan hukum dasar, dikenal dengan nama (oleh Muhammad Yamin) sebagai “Piagama Jakarta” (22 Juni 1945).¹⁸ Di mana pada Sila Pertama yang termaktub dalam Rancangan Pembukaan UUD 1945 yang diterima oleh BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945 yang berasal dari Piagama Jakarta yang berbunyi: “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syareat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, pada tanggal 18 Agustus 1945 diubah bunyinya menjadi: “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perubahan tersebut adalah disebabkan adanya keberatan dari bangsa Indonesia di wilayah bagian Timur yang beragama Nasrani.¹⁹

Dengan demikian dapat dilihat bahwa dalam konteks hubungan antaragama di Indonesia, Pancasila dapat dikatakan sebagai perwujudan dari panggilan mengembangkan titik temu, bukan perbedaan-perbedaan pendapat, menciptakan kehidupan bersama yang toleran, saling menghargai, dan saling mempercayai. Dari proses penerimaan Pancasila itu, jelas terlihat bahwa para pemimpin Islam lebih mementingkan kerukunan dan integrasi nasional daripada mendahulukan kepentingan Islam dan umat muslim belaka. Dalam perspektif mayoritas muslim Indonesia, penerimaan Pancasila merupakan hadiah terbesar umat Islam bagi kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara Indonesia yang majemuk dari segi agama, suku bangsa, adat istiadat, dan lain-lain.²⁰ Di mana pemerintah Indonesia sekarang ini, telah menetapkan agama-agama yang diakui yaitu: Islam, Protestan, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu.²¹

Setelah pemilu pertama tahun 1955, kelompok-kelompok Islam kembali mencoba untuk memperjuangkan ideologi tujuh kata dari Piagam

¹⁸Panitia Sembilan adalah: Ir. Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Tjorosujoso, H. Agus Salim, Mr. Achmad Subardjo, K.H. Wachid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir dan Mr. Muhammad Yamin. Lihat Budiyo, *Pendidikan Pancasila*...., h. 27.

¹⁹Budiyo, *Pendidikan Pancasila*...., h. 32. Dalam UUD 1945 Bab XI AGAMA pasal 29 disebutkan bahwa (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Lihat Yasir Arafat, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amendemennya*, (T.t: Permata Press, t.th), h. 31.

²⁰Taher (editor), *Merayakan Kebebasan Beragama*...., h. 23.

²¹Pada masa Soeharto, Konghucu sempat disingkirkan, dan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid tahun 1998 Konghucu diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Lihat Mujiburrahman, *Mengindonesiakan Islam*....., h. 302.

Jakarta di Sidang Konstituante, namun gagal. Soekarno dengan dukungan kuat tentara bahkan mengeluarkan dekrit kembali ke UUD 1945, membubarkan parlemen dan dimulainya era Demokrasi Terpimpin. Pada masa Demokrasi Terpimpin inilah oleh Soekarno dipropagandakan ideologi NASAKOM (Nasional, Agama, Komunis), yang kemudian gagal setelah terjadinya pemberontakan komunis.

Pada tahun 1965-1966 terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang yang dianggap PKI atau simpatisannya, sehingga orang-orang ketakutan dituduh sebagai PKI. Untuk melindungi dirinya dan keluarganya dengan mendaftarkan diri sebagai pemeluk salah satu dari agama resmi. Akibatnya berduyun-duyunlah orang masuk Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.²²

Pada tahun 1968-1969 para politisi Muslim ingin memperjuangkan kembalinya Piagam Jakarta, namun kembali menemui kegagalan disebabkan tentara mulai berkuasa dan bergabung dengan kaum Kristen dan kaum Nasionalis untuk menolak ideologi tokoh-tokoh Islam tersebut. Bahkan di tahun-tahun ini ada beberapa tokoh Kristen yang mengusulkan agar pemerintah segera menghapuskan Departemen Agama.²³ Selain itu, banyak pula tokoh-tokoh Islam yang merasa terganggu, terancam dengan olah para misionaris yang cukup agresif mendatangi rumah-rumah, membagikan brosur dan Kitab Injil kepada orang Islam. Kegiatan Kristenisasi ini semakin meningkat, sehingga tokoh-tokoh Islam, baik yang reformis ataupun tradisional, merasa kecewa dengan pemerintahan Orde Baru yang ternyata tidak mau memberikan ruang yang leluasa untuk Islam di ranah politik Indonesia.²⁴

Ironisnya, pada pemerintahan Orde Baru apa yang telah dilakukan oleh Kolonial Belanda dan Jepang terulang kembali. Agama dijadikan salah satu sarana bagi pelestarian dan legitimasi kekuasaan. Pemerintah Orde Baru membatasi jumlah agama resmi hanya lima agama, dan melalui struktur kepemimpinan yang ada dalam agama-agama itu pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terhadap masyarakat. Di

²²Mujiburrahman, *Mengindonesiakan Islam....*, h. 376.

²³Mujiburrahman, *Mengindonesiakan Islam....*, h. 248.

²⁴Mujiburrahman, *Mengindonesiakan Islam....*, h. 304.

samping itu adanya upaya pemerintah Orde Baru untuk mendukung kelompok-kelompok tertentu dalam suatu agama, dengan maksud untuk menjadikannya sebagai alat kontrol. Ketegangan atau konflik-konflik yang ada sengaja dipelihara, dengan maksud sebagai bagian dari upaya dominasi atas masyarakat. Dengan demikian pada masa Orde Baru frekuensi ketegangan sosial yang berujung pada perusakan tempat-tempat ibadah mengalami kenaikan yang luar biasa, tanpa disertai solusi yang tuntas. Dengan kata lain, pemerintahan Orde Baru telah menjadikan agama, termasuk konflik-konflik antar-agama sebagai salah satu sarana untuk melayani kepentingan pemerintah, yang dirugikan tentunya adalah para penganut agama dan rakyat pada umumnya.²⁵

Misalnya, pada akhir tahun 1967 kelompok-kelompok pemuda muslim merusak beberapa gereja di Ujungpandang (kini Makasar), Jawa Tengah, dan Aceh. Sebaliknya, di Sulawesi Utara dan Ambon terjadi pembakaran mesjid oleh para penganut Kristen.²⁶ Demikian pula pada akhir tahun 1990-an, adanya kerusuhan di berbagai tempat di Indonesia. Banyak sekali gereja yang dibakar massa dalam kerusuhan-kerusuhan itu. Hingga saat ini tidak ada penjelasan yang pasti siapa yang bertanggungjawab di balik kejadian tersebut. Tentunya kerusuhan-kerusuhan tersebut merupakan noda hitam dalam sejarah bangsa Indonesia, di mana negara terbukti tidak dapat melindungi tempat ibadah kelompok minoritas.²⁷

Dalam perkembangan situasi yang tidak menguntungkan, pemerintahan Presiden Suharto mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan dialog antaragama, dengan mengundang para pemimpin agama untuk menyelesaikan konflik dan pertikaian di antara umat beragama. Misalnya pada tanggal 30 November 1967, melalui Menteri Agama KH Mohammad Dahlan menyelenggarakan musyawarah antaragama pertama. Dan pada tahun 1970-an pada masa Prof. Mukti Ali menjadi Menteri Agama, berusaha menumbuhkan dialog antaragama yang bertitik tolak pada sikap saling percaya dan iktikad baik masing-masing komunitas umat beragama. Prinsip yang ia kembangkan adalah ‘setuju

²⁵Taher (editor), *Merayakan Kebebasan Beragama...*, h. 550-551.

²⁶Taher (editor), *Merayakan Kebebasan Beragama...*, h. 24.

²⁷Mujiburrahman, *Mengindonesiakan Islam...*, h. 262.

dalam perbedaan-perbedaan' (*agree in disagreement*) tanpa harus bertikai dan berkonflik. Di sinilah ia menghidupkan kembali Wadah Musyawarah Antar-Agama dengan melibatkan lebih banyak tokoh dan pemimpin agama, seperti Majelis Ulama Indonesia, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Parisadha Hindu Dharma, dan Perwalian Umat Buddha di Indonesia. Dialog-dialog antaragama ini kemudian disertai dengan kebijakan mencegah terjadinya konflik yang bersumber dari SARA (Suku, Agama, Ras, Antar-golongan). Dengan adanya kebijakan inilah konflik antaragama dapat ditekan seminimal mungkin.²⁸

Sejak jatuhnya pemerintahan Presiden Suharto pada tanggal 1 Mei 1998.²⁹ Konflik dan kekerasan yang berbau agama yang melibatkan umat beragama Muslim dan Kristen kembali muncul di beberapa tempat di Indonesia, seperti di Maluku atau Ambon, Poso (Sulawesi Tengah) dan lain-lain. Umumnya semula bersumber dari masalah-masalah ekonomi, politik dan kegagalan pemerintah dalam menegakkan hukum dan keadilan, kemudian menggunakan agama untuk justifikasi bagi konflik dan kekerasan yang terjadi di antara mereka. Karena itulah tugas pemerintah pada era reformasi ini mengadakan perbaikan kondisi ekonomi, politik, sosial dan hukum, sebagai prasyarat-prasyarat pokok bagi terciptanya kehidupan pluralitas agama yang toleran, rukun, damai dan harmonis,³⁰ dengan selalu mengadakan dialog teologis demi tercapainya teologi kerukunan antar umat bergama.

Dialog Teologis Menuju Teologi Kerukunan

Persoalan sensitif yang dihadapi setiap penganut umat beragama, berupa keyakinan bahwa hanya agamanya yang benar dan yang lain salah, dan dia beranggapan hanya dirinya yang mendapatkan hidayah, hal inilah yang mendorong seseorang kepada sikap fanatik. Sikap inilah yang memunculkan radikalisme dan fundamentalisme pada penganut sebuah agama. Keberadaan mereka tidak mungkin bertemu dan berdialog, karena

²⁸Taher (editor), *Merayakan Kebebasan Beragama.....*, h. 24-25.

²⁹Inu Kencana Syafie dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 51.

³⁰Taher (editor), *Merayakan Kebebasan Beragama.....*, h. 25-26.

mereka tidak pernah percaya dengan pentingnya dialog dan legalitas dialog. Untuk itu, yang bisa diharapkan berdialog adalah kelompok moderat. Dari kelompok inilah sandaran cita-cita untuk melakukan dialog, kesepahaman, dan kerjasama dalam hal-hal yang sama, serta bersikap toleran dalam hal-hal yang berbeda.³¹

Tujuan dari dialog teologis untuk menuju teologi kerukunan umat beragama lebih menitik beratkan pada keinginan dan kebutuhan untuk saling memahami dan saling tukar menukar pengalaman keagamaan. Tentunya dalam hal ini tidak terbesit sedikitpun usaha-usaha untuk secara sepihak menyalahkan, mengkafirkan, mengolok-olok, menganggap tidak selamat sistem kepercayaan dan keimanan yang dimiliki oleh orang lain. Kita menerima keberadaan orang lain seperti adanya, tanpa keinginan untuk mengubah keyakinan agamanya supaya sama dengan keyakinan yang kita miliki. Di sini yang diperlukan adalah proses saling mengenal dan saling memahami eksistensi dan hak masing-masing penganut agama.³²

Dengan demikian dialog teologis antar umat beragama mencerminkan mentalitas cara berpikir, bertindak dan perilaku keagamaan yang lebih santun, tulus, rendah hati mengakui eksistensi warna-warni keagamaan tersebut, tetapi sekaligus memustahilkan untuk menyatukan seluruh warna-warni keagamaan yang ada. Untuk itulah kerjasama antar berbagai umat beragama dalam praksis kehidupan, dengan tetap mengakui otonomi dan eksistensi metafisis warna keagamaan masing-masing tersebut, hal ini lebih menjanjikan dan memberikan harapan baru.³³

Karena itulah dialog teologis kian disadari semakin penting untuk dilakukan sebagai landasan menciptakan teologi kerukunan umat beragama, di mana dialog teologis ini bertujuan untuk membangun kesadaran bahwa di luar keyakinan dan keimanan kita selama ini, ternyata ada banyak sekali keyakinan dan keimanan selain kita. Dengan demikian dialog teologis

³¹Yûsuf al-Qaradhâwî, *Nahnu wa al-Gharb (As'ilah sya'ikah wa Ajwibah Hasimah)*, Terj. Rif Munandar Riswanto dan Yadi Saeful Hidayat, *Kita dan Barat Menjawab Berbagai Pertanyaan Menyudutkan Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 276-277.

³²M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 177-179.

³³Abdullah, *Islamic Studies.....*, h. 181.

menghadapi persoalan bagaimana kita memposisikan iman kita di tengah-tengah iman orang lain. Bolehkah kita secara teologis membenarkan iman orang lain yang berbeda agamanya dengan kita.? Mungkinkah ada kebenaran selain kebenaran yang kita yakini.? Kalau memang ada, di mana keistimewaan agama kita sendiri.? Apakah masalah-masalah keimanan dapat didialogkan? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini akan muncul dalam dialog teologis.³⁴

Salah satu tujuan terpenting dalam dialog teologis adalah berbagi pengalaman keagamaan, bukannya menimbulkan perdebatan dan perbantahan satu sama lain. Untuk itulah bagi yang terlibat dialog teologis harus dipenuhi beberapa syarat, antara lain: (1) bagi mereka yang mempunyai pengalaman iman secara intens berdasarkan keyakinan agama masing-masing; (2) diperlukan kejujuran dan keterbukaan sehingga orang lain dapat mengambil manfaat keberimanan seseorang seobyektif mungkin; dan (3) para partisipan hendaknya terbebas dari sikap hendak menggurui atau menjadikan orang lain sebagai pengikut.³⁵

Untuk itu sebaiknya dalam dialog teologis tidak perlu memunculkan tema-tema yang musykil seperti membongkar doktrin-doktrin teologis masing-masing agama. Dialog teologis tidak untuk merelatifkan kebenaran subyektif yang diyakini oleh masing-masing umat beragama, tetapi lebih untuk memperkaya pengalaman keagamaan dan pengetahuan akan tradisi agama-agama lain. Tujuannya adalah untuk membandingkan aspek-aspek kesamaan dan pengalaman religius dan suasana dialogis, masing-masing pemeluk agama dapat belajar bahwa semua agama sama-sama menyeru kepada kebaikan dan kebenaran. Dengan dialog teologis, para pemeluk agama dapat belajar dari pengalaman masing-masing bagaimana ajaran agama-agama itu dipraktikkan. Di sinilah perlu adanya sikap tulus dan jujur, bukan dengan pretense menghakimi atau mencari-cari kesalahan orang lain. Oleh sebab itu,

³⁴M. Ilham Masykuri Hamdie, *Pluralisme Agama Menuju Dialog Antar Agama Telaah Pemikiran Dimensi Sufistik Nurcholish Madjid*, (Banjarasin: Antasari Press, 2006), h.180.

³⁵Komaruddin Hidayat, "Dialog Antar Iman", dalam *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 190-191.

dialog teologis tidak dibenarkan mengintervensi kebenaran teologis yang diyakini orang lain baik system keimanan, maupun ritus ibadahnya. Hendaknya jangan dibandingkan wawasan ideal dengan realitas praktis orang lain. Dalam dialog teologis hendaknya kenyataan yang riil diperhadapkan dengan yang riil, dan prinsip ideal keagamaan dengan prinsip ideal keagamaan yang lain.³⁶

Yusuf al-Qaradhawi yang terkenal sebagai ulama konservatif yang sangat berpengaruh di berbagai dunia Islam, menegaskan bahwa umat Islam mendukung dialog teologis karena syariat Islam telah memerintahkan kami untuk melakukan hal tersebut. Al-Qur'an banyak dipenuhi dengan peristiwa dialog yang dilakukan oleh para rasul dengan kaumnya, dialog antara Allah dengan beberapa hamba-Nya, sampai dialog antara Allah dengan iblis. Oleh sebab itu, kita menyambut tradisi dialog untuk menggantikan budaya konflik, baik yang dilakukan antar peradaban atau antar agama. Sehingga kita berharap agar orang di luar Islam tidak phobi terhadap Islam, tidak menganggap sebagai bahaya baru atau bahaya hijau sebagaimana diistilahkan oleh beberapa kalangan, dan menominasikan sebagai musuh baru setelah kejatuhan "bahaya merah" Uni Soviet yang diistilahkan Reagan sebagai Negara jahat, dan setelah terjadinya kedekatan dengan "bahaya kuning" yaitu Cina.³⁷

Untuk itulah dengan dialog teologis ini dapat membebaskan prasangka, kecurigaan, bahkan saling bermusuhan dan saling membenci yang dapat menimbulkan konflik. Sehingga dapat diharapkan munculnya optimisme untuk mendapatkan saling pengertian dan kerja sama antar umat beragama sehingga terciptanya teologi kerukunan umat beragama.

Penutup

Keberagaman bukan hanya sebagai sebuah realitas sosial (*pluralitas*), melainkan juga sebagai gagasan-gagasan, paham-paham, dan pikiran-pikirannya. Pluralisme sebagai keniscayaan teologis yang bersumber dari

³⁶Hamdie, *Pluralisme Agama*....., h. 182.

³⁷al-Qaradhâwî, *Nahnu wa al-Gharb*....., h. 271.

Islam sendiri yang tampak dalam kehidupan Nabi Muhammad saw. yang bersinggungan langsung dengan pemeluk agama Yahudi dan Nasrani, dengan sangat menyakinkan bahwa Islam bukan agama yang eksklusif.

Timbulnya aksi-aksi intoleransi dan kekerasan yang terjadi antar sebagian penganut agama Islam dan Nasrani di Indonesia khususnya yang mengatasnamakan agama, menunjukkan bahwa pluralitas agama, termasuk di dalamnya kebebasan beragama, tengah menghadapi problema serius. Untuk itu diperlukan sebuah dialog teologis yang dapat dipahami sebagai perjumpaan dan percakapan mengenai persoalan bersama antara orang atau kelompok yang berbeda pandangan, dengan tujuan agar dapat belajar, mendengar secara terbuka, jujur dan simpati sehingga dapat memahami posisi orang lain secara tepat, dan dapat mengubah prasangka-prasangka buruk serta celaan.

Dengan pandangan yang progresif melalui dialog teologis ini diharapkan munculnya optimisme untuk mendapatkan saling pengertian dan kerjasama antar umat beragama, sehingga terciptanya teologi kerukunan umat beragama di Indonesia tercinta ini []

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, (2006), *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- ‘Ali Sya’ban, Hilmi, (2007), *Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallah*, Terj. Tholhatul Choir Wafa, *Nabi Muhammad*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Arafat, Yasir, (t.th), *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemennya*, T.t: Permata Press.
- Budiyono, Kabul, (2009), *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Bandung: Alfabeta.
- Hamdie, M. Ilham Masykuri, (2006), *Pluralisme Agama Menuju Dialog Antar Agama Telaah Pemikiran Dimensi Sufistik Nurcholis Madjid*, Banjarmasin: Antasari Press.
- Hidayat, Komaruddin, (1998), “*Dialog Antar Iman*”, dalam *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, Jakarta: Paramadina.
- Misrawi, Zuhairi, (2007), *Al-Qur’an Kitab Toleransi Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*, Jakarta: Fitrah.
- Mujiburrahman, (2008), *Mengindonesiakan Islam Representasi dan Ideologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, Budhy Munawar, (2004), *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Shihab, Alwi, (2009), *Antara Tasawuf Sunni dan Tasawuf Falsafi Akar Tasawuf di Indonesi*, Depok: Pustaka IIMaN.
- Syafiie, Inu Kencana dan Azhari, (2009), *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Taher, Elza Peldi (editor), (2009), *Merayakan Kebebasan Beragama Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*, Jakarta: ICRP.
- Tim Penyusun, (1997). *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.